

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah.

Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat.

Majunya perekonomian suatu daerah diukur menggunakan pertumbuhan ekonominya atau perkembangan jumlah PDRB, jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. Diperlukan pengembangan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun semakin tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menimbulkan masalah lain berupa ketidakmerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau daerah disebabkan karena adanya perbedaan potensi sumber daya manusia, infrastruktur dan potensi sumber daya alamnya. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi.

Dalam merealisasikan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi regional perlu adanya keseimbangan yang ideal antar berbagai sektor yang ada. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah masing-masing memiliki keunggulan yang tergantung pada kondisi wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan struktur perekonomian setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam merencanakan kebijakan perekonomian, sehingga setiap daerah harus mempunyai sektor unggulan yang sesuai dengan kemampuan daerahnya.

Sektor unggulan biasanya dilihat dari sektor basis yang dimiliki setiap kabupaten/kota dimana sektor tersebut mempunyai peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan. Sektor basis dijadikan andalan untuk mengembangkan wilayah, sehingga dapat dipilih sektor unggulan dari setiap sektor yang ada di setiap kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten Magelang secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Dengan luas wilayahnya 108.573 Ha dan kecamatan terluas

adalah kecamatan Kajoran, yaitu 8,341 Ha atau 7,68% dari luas Kabupaten Magelang secara keseluruhan.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014

Kecamatan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Salaman	5,93	5,29	6,66	5,47	5,64
2. Borobudur	5,52	4,51	6,33	5,56	6,33
3. Ngluwar	3,51	4,17	5,21	5,59	4,24
4. Salam	4,13	4,43	5,92	5,71	4,17
5. Srumbung	5,31	3,23	5,33	4,87	3,35
6. Dukun	0,44	3,21	4,59	4,95	3,96
7. Muntilan	5,3	6,44	7,05	5,93	6,42
8. Mungkid	4,28	4,41	6,15	5,62	5,84
9. Sawangan	1,64	3,04	4,41	4,97	3,83
10. Candimulyo	2,63	4,47	5,04	5,77	4,66
11. Mertoyodan	4,61	4,68	5,99	6,49	8,32
12. Tempuran	4,65	4,18	5,85	6,43	7,52
13. Kajoran	5,97	2,14	5,18	4,74	4,29
14. Kaliangkrik	2,64	2,26	4,09	4,92	3,91
15. Bandongan	3,1	3,33	5,76	5,53	4,06
16. Windusari	3,54	4,31	4,55	5,07	2,62
17. Secang	4,63	5,5	6,43	6,05	6,14
18. Tegalrejo	5,88	3,93	4,98	5,29	4,31
19. Pakis	6,63	3,67	5,52	4,95	3,45
20. Grabag	5,96	5,03	6,53	5,46	6,33
21. Ngablak	3,52	3,98	7,2	5,02	3,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas terlihat ke-21 kecamatan di Kabupaten Magelang tersebut, Kecamatan Mertoyudan laju pertumbuhan ekonominya paling signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat paling tinggi pada tahun 2014 (8,32 persen). Di bawah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Tempuran (7,52 persen) kemudian ada Kecamatan Secang (6,14 persen) yang juga meningkat setiap tahun. Sedangkan kecamatan lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah Kecamatan Windusari sebesar 2,62 persen, Kecamatan Ngablak sebesar 3,33 persen, Kecamatan Salam

sebesar 4,17 persen, Kecamatan Srumbung sebesar 3,35 persen, Kecamatan Dukun sebesar 3,96 persen dan Kecamatan Pakis sebesar 3,45 persen.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu melalui optimalisasi potensi daerah yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat dan pemasukan ekonomi daerah, oleh karena itu perlu adanya analisis potensi wilayah Kabupaten Magelang untuk mengetahui potensi-potensi wilayah di Kabupaten Magelang yang sudah dimanfaatkan secara optimal ataupun belum, sehingga potensi wilayah yang belum dioptimalkan dapat lebih dikembangkan. Melalui analisis potensi wilayah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Magelang.

Letak geografis Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung sebelah utara adalah wilayah Semarang dan sebelah selatannya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Perkembangan perekonomian Kabupaten Magelang semakin meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berikut.

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Magelang

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	3618799.33	4118251.29	4277173.9	4663034.2	4905198.81
pertambangan & penggalian	575538.47	642573.93	691971.35	758100.91	925847.17
industri pengolahan	2736572.72	3217930.99	3679575.76	4263389.97	4873746.82
listrik, gas & air bersih	26265.08	27459.27	28417.37	29174.75	30013.33
Bangunan	1355724.58	1450807.21	1649342.43	1814903.01	2046487.5
perdagangan, hotel & restoran	2204607.24	2440408.48	2583636.29	2802601	3000680.48
pengangkutan & komunikasi	1581465.09	1711419.93	1874205.8	2047362.13	2357920.84
keuangan, sewa & jasa perusahaan	1938038.59	2226997.38	2599721.86	2896227.89	3238772.19
jasa-jasa	326219.47	344117.06	347447.37	398004.03	462645.82
PDRB	14363230.57	16179965.52	17731492.11	19672797.89	21841313.96

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2014

Mencermati perkembangan perekonomian kabupaten Magelang dari tahun ke tahun sebagaimana diuraikan di atas maka menarik untuk mengkaji dan

menganalisis mengenai pengembangan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan potensi dan permasalahan sumber daya wilayah yang ada menjadi leading sektorbagi Kabupaten Magelang. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “**Analisis Keruangan Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana variasi keruangan sektor ekonomi di kabupaten magelang?
2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji variasi keruangan sektor basis dan non basis Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi basis di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasidan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Pembangunan Ekonomi Regional

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangannya terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah.

Todaro dalam Sirojuzilam (2008:16), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dan potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

1.5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dan wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai

indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008:18).

Menurut Glasson (1977:86) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dan penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor diluar daerah, atau kombinasi dan keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dan daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan subsektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa.

Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dan perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

1.5.1.3 Pendapatan Regional

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985:17). Sedangkan menurut Tarigan (2007:13), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dan total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dan seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan

biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dan masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

- 1) Pertanian.
- 2) Pertambangan dan Penggalian.
- 3) Industri Pengolahan.
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- 5) Bangunan/Konstruksi.
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- 9) Jasa-jasa.

b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar.

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dan seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

- 1) Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Tanigan, 2007:24), yaitu:
 - a) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dan barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Total penyediaan barang dan jasa

dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor netto (ekspor-impor).

b) Pendekatan Produksi (*Production Approach*).

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Untuk menghitung pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi, maka yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dan tiap-tiap sektor.

c) Pendekatan Penerimaan (*Income Approach*).

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Jadi yang dijumlahkan adalah upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung netto.

2) Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini. Digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

1.5.1.4 Teori Basis Ekonomi

Menurut Arsyad (1999:116), mengemukakan bahwa teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga

kerja (*job creation*) dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang.

Selanjutnya dikemukakan bahwa teori basis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yang sangat tergantung dari permintaan luar daerah akan produk-produk daerah tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam mengekspor keluar daerah tersebut. Ekspor tersebut baik dalam bentuk barang maupun jasa termasuk tenaga kerja. Industri yang melakukan kegiatan ekspor disebut sektor basis. Apabila permintaan akan barang dan jasa meningkat (ekspor), dari daerah maka sektor basis akan berkembang dan pada gilirannya nanti perkembangan ini akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor non basis. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pendapatan, investasi, konsumsi dan kemampuan kerja di dalam daerah.

1.5.1.5 Pendekatan Geografi dalam Pengembangan Wilayah

Secara teoritis, dalam menelaah suatu persoalan keruangan, Geografi memiliki tiga pendekatan utama yaitu analisis spasial, analisis ekologis dan analisis kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan cara yang lebih tepat digunakan untuk menelaah fenomena geografis yang memiliki tingkatkerumitan tinggi karena banyaknya variabel pengaruh dan dalam lingkup multi dimensi (ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan) (Yunus, 2010).

Pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan pendekatan keruangan dan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain karena ada perbedaan permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pada pendekatan ini analisa keruangan dan analisa ekologi atas wilayah dan atas interaksi antar wilayah tersebut tak hanya dipandang dari sisi penyebaran penggunaannya serta penyediaannya saja, tapi juga interaksinya dengan manusia pada wilayah tersebut (Yunus, 2010).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai sektor basis dan sektor unggulan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagian besar analisis yang digunakan adalah

analisis *LQ Shift Share*. Ada juga peneliti yang menambahkan analisis tipologi Klassen dan analisis Skalogram. Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini.

Nevipahlevi (2011) melakukan penelitian dengan judul Perkembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak. Berdasarkan analisis *LQ* dan *Shift Share* terdapat dua sektor basis di Kecamatan Wanasalam, yaitu: sektor pertanian, dan sektor bangunan dan konstruksi. Pertumbuhan komponen proportional Kecamatan Wanasalam selama periode tahun 2005 - 2008 ada yang bernilai negatif dan positif. Nilai *P* positif, berarti perekonomian Kecamatan Wanasalam berspesialisasi pada sektor yang sama yang tumbuh cepat pada perekonomian Kabupaten Lebak. Sebaliknya apabila nilai *P* negatif, berarti perekonomian Kecamatan Wanasalam berspesialisasi pada sektor yang sama dan tumbuh lambat pada perekonomian Kabupaten Lebak.

Haris (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penentuan sektor/subsektor Unggulan dan Kaitanya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara. Hasil analisis menggunakan gabungan analisis *Location Quotient*, analisis *Shift Share*, terdapat 7 subsektor unggulan yaitu subsektor kehutanan, subsektor listrik, subsektor perdagangan, subsektor angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, subsektor perkebunan, subsektor perbankan. 6 subsektor sudah masuk RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD.

Aris (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Hasil analisis menggunakan analisis *Location Quotien* (LQ). Berdasarkan hasil dari analisis *Location Quotien* (LQ) kecamatan Gemolong memiliki 5 sektor Basis yaitu sektor Listrik dan Air Minum sebesar 1.1952, Sektor Bangunan/ Konstruksi mempunyai LQ sebesar 1.12204, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai LQ sebesar 1.1490, Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan mempunyai LQ sebesar 1.2180 dan LQ sebesar 1.12260.

Astri (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Spasial Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008-2014. Hasil analisis menggunakan hasil dari kedua analisis dengan kriteria cepat tumbuh, sektor basis dan tumbuh lebih cepat dari kabupaten yaitu: sektor industri terdapat di Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo. Sektor gas, listrik dan air bersih terdapat di Kecamatan Sukoharjo. Sektor bangunan terdapat di kecamatan grogol. Sektor perdagangan hotel, restaurant terdapat di Kecamatan Bendosari, Nguter, Bulu, dan Weru. Sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat di Kecamatan Gatak, Mojolaban, Polokarto, Nguter dan Tawang Sari. Sektor keuangan jasa perusahaan terdapat di Kecamatan Gatak, Baki, Bendosari, dan Bulu. Sektor jasa-jasa terdapat di Kecamatan Gatak, Baki.

Tabel 1.3. Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Nevipahlevi (2011)	Perkembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak.	- Mengetahui sektor basis dan non basis - Mengetahui sektor unggulan perekonomian wilayah Kecamatan Wanasalam sebagai kawasan agropolitan	Analisis data sekunder	Terdapat dua sektor basis di Kecamatan Wanasalam, yaitu: sektor pertanian, dan sektor bangunan dan konstruksi. Pertumbuhan komponen proportional Kecamatan Wanasalam selama periode tahun 2005 - 2008 ada yang bernilai negatif dan positif.
Zulfi Haris (2012)	Analisis Penentuan sektor/subsektor Unggulan dan Kaitanya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara.	- Identifikasi Sektor/Sub sektor Unggulan - Bagaimana dukungan pemerintah daerah kabupaten lampung utara terhadap sektor/sub sektor unggulan melalui program prioritas dalam RPJMD dan alokasi anggaran.	Analisis data sekunder	Terdapat 7 subsektor unggulan yaitu subsektor kehutanan, subsektor listrik, subsektor perdagangan, subsektor angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, subsektor perkebunan, subsektor perbankan. enam subsektor sudah masuk RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD.

Aris Munandar (2010)	Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.	- Mengidentifikasi letak strategis kecamatan Gemolong - Identifikasi perubahan sektor basis	Analisis data sekunder	- Ditetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi - Kecamatan gemolong memiliki 5 sektor basis
Astri Irawati (2016)	Analisis Spasial perkembangan ekonomi wilayah di kabupten sukoharjo	- Mengkaji variasi keruangan sektor basis dan non basis - Mengkaji variasi keruangan perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah	Analisis data sekunder	Hasil dari kedua analisis dengan kriteria cepat tumbuh, sektor basis dan tumbuh lebih cepat dari kabupaten yaitu: sektor industri terdapat di Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo. Sektor gas, listrik dan air bersih terdapat di Kecamatan Sukoharjo. Sektor bangunan terdapat di Kecamatan Grogol. Sektor perdagangan hotel, restaurant terdapat di Kecamatan Bendosari, Nguter, Bulu, dan Weru. Sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat di Kecamatan Gatak, Mojolaban, Polokarto, Nguter dan Tawang Sari. Sektor keuangan jasa perusahaan terdapat di Kecamatan Gatak, Baki.

1.6 Kerangka Penelitian

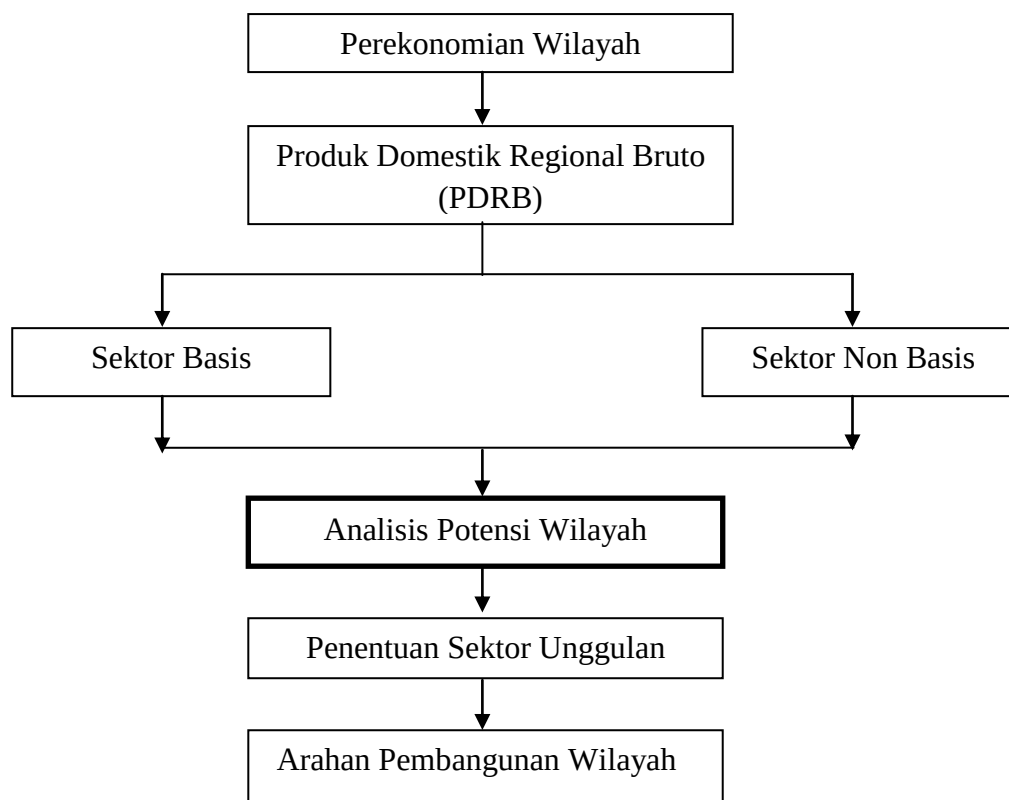
Analisis tentang faktor pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun. Barang dan jasa dari sektor basis yang di ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis.

Perencanaan pembangunan ekonomi dalam hal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan salah satu caranya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, apabila ada satu atau beberapa sektor yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah tersebut, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang kemudian akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 1



Gambar 1.1. Skema Kerangka Penelitian

1.7 Batasan Operasional

- 1) **Sektor Unggulan (*leading sector*)** adalah sektor yang memiliki peranan (*share*) relatif besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi wilayah (PDRB).

- 2) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.
- 3) **Sektor Ekonomi** adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang mencakup 9 (sembilan) sektor utama.
- 4) **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
- 5) **Sektor Basis** adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa-jasa keluar batas perekonomian masyarakat bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada lingkup yang lebih luas. Sektor basis bila nilai $LQ > 1$ maka di sebut sektor basis
- 6) **Sektor Non Basis** adalah sektor yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri dan sektor ini tidak mengekspor barang diluar daerah. Bila nilai $LQ < 1$ maka disebut sektor non basis
- 7) **Analisis** adalah merangkum sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.
- 8) **Perkembangan Wilayah** merupakan kata lain dari pertumbuhan wilayah. Perkembangan wilayah dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yaitu adanya peningkatan output/produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Perkembangan wilayah dengan pendekatan sektoral mengkaji berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor-sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa (Sirojuzilam, 2008).